

Kota Santri, Bumi Shalawat Nariyah Dan Bulé-Dhika: Reproduksi Kebudayaan Pandalungan Dalam Kontruksi Identitas Di Situbondo

Mohammad Isfironi

Universitas Ibrahimy Situbondo

moh.isfironi@gmail.com

Abstract

Culture is something that is socially constructed. Therefore, culture is inseparable from the interests of the actors or social agents involved in it. Identity is also formed in the dialectical process which involves all of these actors. The focus of this article is to answer the question of how these actors interpret the process of cultural reproduction in the context of the formation of identity in Situbondo, which is culturally characterized by pendalungan. With Peter L Berger's social construction theory analysis tools it is understood that the multi-ethnic Pandalungan Situbondo Community in the process of forming their identities is always in the process of negotiation. This process in turn is able to reproduce the Situbondo Pandalungan culture. This condition appears to be represented in the terms of the Kota Santri and Bumi Shalawat Nariyah besides the Bulé-dhika language. These facts then provide opportunities for Islamic symbols to be accommodated as identity markers for a Pandalungan Community in Situbondo.

Keywords: Kota Santri, Bumi Shalawat Nariyah, Bulé-Dhika, Cultural Reproduction, Identity Construction.

Abstrak

Budaya adalah sesuatu yang dikonstruksi secara sosial. Oleh karena itu, budaya tidak dapat dipisahkan dari kepentingan para aktor atau agen sosial yang terlibat di dalamnya. Identitas juga terbentuk dalam proses dialektika yang melibatkan semua aktor tersebut. Fokus artikel ini untuk menjawab pertanyaan bagaimana aktor-aktor tersebut memaknai proses reproduksi budaya dalam konteks pembentukan identitas di Situbondo, yang secara budaya bercirikan pendalungan. Dengan alat analisis teori konstruksi sosial Peter L Berger dapat dipahami bahwa Komunitas Pandalungan Situbondo yang multi-etnis dalam proses pembentukan identitasnya selalu dalam proses negosiasi. Proses ini pada gilirannya mampu mereproduksi budaya Pandalungan Situbondo. Kondisi ini tampaknya terwakili dalam istilah Kota Santri dan Bumi Shalawat Nariyah selain bahasa Bulé-dhika. Fakta-fakta tersebut kemudian memberikan peluang bagi simbol-simbol Islam untuk diakomodasi sebagai penanda identitas bagi Komunitas Pandalungan di Situbondo.

Kata Kunci: Kota Santri, Bumi Shalawat Nariyah, Bulé-Dhika, Reproduksi Budaya, Konstruksi Identitas.

Pendahuluan

Kebudayaan sebagaimana telah dipahami kepada kita merupakan suatu *blue print* bagi perjalanan kehidupan manusia. Kebudayaan merupakan suatu pedoman tingkah lagi yang dapat bersifat memaksa bagi setiap individu, karena ia adalah fakta sosial. Pandangan semacam inilah yang mempengaruhi kecenderungan cara orang memahami kebudayaan dari hanya segi bagaimana proses pewarisannya. Bagaimana proses pewarisan itu terjadi, Geertz (1973: 89) membayangkan budaya “sebagai pola dari pengertian-pengertian atau makna-makna yang terjalin secara menyeluruh dalam simbol-simbol dan ditransmisikan secara histories”. Dengan mewariskan konsepsi-konsepsi simbolik inilah pada akhirnya manusia dapat mengembangkan pengetahuan dan sikapnya terhadap kehidupan.

Irwan Abdullah (2007: 2), memosisikan kebudayaan sebagai sistem simbol ini mengandung empat persoalan penting, yaitu: *pertama*, bahwa berbagai ekspresi kebudayaan dan pembentukan simbol-simbol senantiasa berada pada batas-batas ruang budaya tertentu, sementara itu batas-batasnya senantiasa mengalami pergeseran-pergeseran dinamis. *Kedua*, batas-batas itu menentukan konstruksi makna yang dipengaruhi oleh hubungan kekuasaan yang melibatkan sejumlah aktor. *Ketiga*, pola hubungan kekuasaan ini menjejantah dalam identitas kelompok dan kelembagaan yang menentukan cara pandang antar kelompok. *Keempat*, identitas yang terbentuk melalui serangkaian simbol selain diterima juga telah menjadi objek perbincangan, perdebatan dan gugatan yang menegaskan perubahan yang mendasar dalam batas-batas kebudayaan.

Saat ini masihkah batas-batas kebudayaan mengacu pada batas secara fisik geografis. Tentu batas secara fisik masih penting, misalnya budaya Jawa selalu menunjuk pada suatu tradisi yang hidup di sebuah pulau yang disebut Jawa, demikian pula halnya bila kita menyebut budaya Bali, pikiran kita langsung tertuju pada pulau Dewata, pulau Bali. Namun demikian, perubahan masyarakat justru menunjukkan kecenderungan lain dalam mendefinisikan suatu praktik yang menunjukkan proses mencairnya batas-batas ruang (fisik).

Definisi kebudayaan yang dibangun dengan mengabaikan perubahan-perubahan yang terjadi, atau hanya mengacu pada *social setting* yang telah berlalu akan cenderung mengalami hambatan pada saat digunakan secara praktis menata kehidupan masa kini. Konsep kebudayaan yang digunakan sejak zaman Franz Boas telah dilihat dalam kaitannya dengan *culture area* (area kebudayaan) menyebabkan kebudayaan didefinisikan dalam konteks fisik dengan batas-batas geografi yang jelas (Abdullah, 2008: ix). Namun tatkala dunia telah menjadi sebuah wilayah tanpa batas (*borderless world*) yang telah mempengaruhi seluruh sektor kehidupan, misalnya sektor ekonomi, maka batas fisik mencair dengan sendirinya.

Kondisi yang demikianlah yang mendorong orang mencoba untuk mendefinisikan ulang identitasnya, apalagi suatu wilayah tersebut memang dalam sejarahnya

telah terjadi pembauran antar etnis sehingga tradisi masyarakat asal di daerah tersebut bisa disebut sangat tidak nampak bahkan hilang sama sekali sebagaimana yang terdapat di Kabupaten Situbondo Jawa Timur.

Masyarakat Muslim yang tinggal di kawasan budaya pendalungan Jawa Timur seperti Kabupaten Situbondo juga tidak terelakkan harus pula memberikan definisi ulang atas kebudayaan yang selama ini diacu, terlebih mereka juga merupakan kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang etnis yang berbeda-beda. Masyarakat “Pendalungan” merupakan sebuah masyarakat *hybrid* atau campuran dari berbagai macam suku bangsa dengan suku bangsa dominannya Jawa dan Madura selain Bugis dan lainnya yang secara terus menerus memaknai kehidupan historisnya sendiri. Sementara para pakar politik menyebut kawasan ini sebagai kawasan tapal kuda (Sparringa, 2006).

Dalam konteks masyarakat Pendalungan Situbondo, berbagai aktivitas yang mengindikasikan sebuah upaya pendefinisian kembali identitas kelompok yang mewarnai proses kehidupan sehari-hari masyarakat. Di dalam proses politik di tingkat elit kekuasaan juga nampak diwarnai perdebatan yang cukup dinamis, seperti tentang penetapan hari jadi kota Situbondo, perumusan jargon-jargon seperti kota SANTRI, kota Bumi Shalawat Nariyah atau upaya-upaya mencari mencari representasi simbolik budaya Situbondo melalui penetapan pakaian khas Situbondo, batik dan kerajinan serta seni-seni khas Situbondo. Realitas-realitas tersebut cukup jelas mengindikasikan bahwa suatu proses produksi dan reproduksi kebudayaan tengah terjadi.

Menelaah konstruksi sosial terhadap realitas di atas penting dilakukan karena melalui pemahaman atas proses tersebut diharapkan akan dapat dipahami apa yang sesungguhnya menggerakkan kehidupan masyarakat muslim di Situbondo. Bagaimana berbagai pengetahuan dihasilkan dan direproduksi melalui berbagai bentuk wacana dan oleh agen yang berbeda dan untuk kepentingan yang berbeda. Hal ini menurut konsep “*power/knowledge*” menunjukkan betapa reproduksi pengetahuan telah menjadi kekuatan penting yang menggerakkan seluruh proses pemaknaan kehidupan itu sendiri. Artikel ini bermaksud membahas bagaimana proses reproduksi tersebut menjadi bagian dari proses konstruksi identitas masyarakat Muslim di Situbondo.

Kajian Terdahulu

Diskusi yang mengarah pada proses pemaknaan kembali kultur daerah asal, dalam konteks Indonesia dapat dikatakan masih bersifat baru, terutama yang memberikan pemaknaan baru tentang konteks sosial budaya yang berubah-ubah. Tidak mengherankan apabila tidak mudah menemukan karya-karya terdahulu dengan tema dimaksud dengan konteks sosio-kultural Indonesia. Berikut, beberapa diantaranya yang dapat ditelusuri yang penulis anggap relevan dengan tema dalam

artikel ini.

Frederik Barth dalam bukunya *Kelompok Etnik dan Batasannya*, menawarkan suatu cara memberikan batasan-batasan terhadap kelompok-kelompok etnik serta apa saja yang menjadikan suatu suku bangsa masih dapat dipertahankan. Barth mengusulkan beberapa definisi etnik yang menunjuk pada suatu kelompok tertentu yang karena kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa, ataupun kombinasi dari kategori tersebut terikat pada sistem nilai budayanya. Kelompok etnik adalah kelompok orang-orang sebagai suatu populasi yang : *pertama*, dalam populasi kelompok mereka mampu melestarikan kelangsungan kelompok dengan berkembang biak. *Kedua*, mempunyai nilai-nilai budaya yang sama, dan sadar akan rasa kebersamaannya dalam suatu bentuk budaya. *Ketiga*, membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri, dan *keempat*, menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi lain.

Di dalam kajiannya, Barth mengacu atau tepatnya mengkritik pandangan sederhana, yaitu: bahwa ada dua faktor yang mampu mempertahankan budaya suatu suku atau bangsa yaitu isolasi geografis dan isolasi sosial. Jadi walaupun terjadi pembauran ternyata batas-batas budaya masih bisa bertahan. Dalam proses saling mempengaruhi antar berbagai budaya ditemukan hubungan sosial yang mantap, bertahan lama, antara kelompok etnik yang berbeda. Dengan kata lain, ciri masing-masing kelompok etnik tidak ditentukan oleh tidak adanya interaksi dan penerimaan sosial, tetapi sebaliknya justru karena didasari oleh terbentuknya suatu sistem sosial tertentu.

Barth mengingatkan agar dalam setiap kajian tentang etnik dan budaya tidak mengacu pada definisi-definisi yang menjebak seperti dalam buku-buku antropologi lama. Cara mendefinisikan yang kurang tepat akan berakibat pada tidak mungkin teramatinya fenomena-fenomena kelompok etnik secara menyeluruh serta posisi mereka dalam kehidupan masyarakat dan budaya. Mempertahankan batas etnik tidaklah penting karena hal ini akan terjadi dengan sendirinya akibat adanya faktor-faktor isolasi seperti ras, perbedaan budaya, perbedaan sosial dan perbedaan bahasa.

Proses reproduksi masyarakat ternyata memiliki implikasi spasial sebagai bagian dari alur transformasi ruang bermukim. Hal ini terlihat dalam karya Putri Nurul Probawati, yang berjudul "*Reproduksi Masyarakat dan Implikasi Spasial dalam Proses Transformasi Kampung Laweyan*". Dalam penelitiannya, penulis ingin melihat seberapa jauh transformasi dalam proses perkembangan kota merasuk dalam kehidupan dan perilaku agen di Kampung Laweyan Kota Surakarta. Bagaimana proses transformasi tidak meningkatkan budaya jawa dan batik sebagai identitas kawasan.

Pemukiman kampung Laweyan merupakan suatu fenomena kehidupan yang unik, sebagai salah satu sisi kehidupan kota Surakarta. Kehidupan sosial-budaya masyarakat kampung Laweyan secara umum mengacu pada aspek-aspek budaya

Jawa yang justru banyak dilanggar. Wujud tradisional kampung ini sangat dipengaruhi oleh sejarah terbentuknya kawasan pemukimannya. Konstruksi kultural semacam ini mempengaruhi ciri khas dari corak perekonomian yang menopang kehidupan masyarakat berupa praktik-praktik informal (membatik) yang dilandasi oleh kekuatan privat pada sektor batik.

Dari hasil penelitian ditemukan, bahwa perkembangan kota Surakarta berpengaruh pada proses transformasi kampung Laweyan. Transformasi kampung terjadi karena adanya reproduksi masyarakat dan praktik sosial yang berimplikasi kepada aspek spasial kampung. Bagi komunitas asli kampung Laweyan dipandang sebagai ruang kehidupan mereka, tempat menjalankan aktivitas, praktik sosial dan ruang bermukim. Keberadaan komunitas asli sebagai komponen dasar terbentuknya kampung dengan sumberdaya yang dimiliki menunjukkan kemampuan untuk bersaing dengan arus modernisasi dari luar. Adanya ikatan emosional dengan tempat tinggal merupakan satu hal yang mendorong masyarakat kampung Laweyan tetap ingin bertahan. Dengan membatik mereka mengumpulkan sebanyak-banyak keuntungan sebagai seorang individu. Namun seiring perkembangan pembagian ruang bermukim nampak makin tidak jelas.

Arah perkembangan yang cenderung komersial nampak mulai mengancam dan akan menghilangkan substansi dasar pembentukan kampung sebagai pemukiman komunitas batik. Kenyataan di kampung Laweyan keduanya tidak terpisahkan saling mempengaruhi satu sama lain. Namun jika arus perkembangan kota Surakarta tidak terkontrol, maka dimungkinkan kampung Laweyan akan menjadi kawasan kota namun tidak memiliki ciri kehidupan sosial dan budaya seperti sekarang ini.

Sementara itu dari karya Raudlatul Jannah yang berjudul: “***Jember Fashion Carnival: Konstruksi Identitas dalam Masyarakat Jaringan***”, konstruksi identitas juga nampak pada sebuah event karnaval. Dalam *Jember Fashion Carnival* (JFC) dihadirkan sebuah *catwalk* terpanjang di dunia yakni 3,6 km di sepanjang jalan Kota Jember. Para peserta dengan kostum rancangan mereka sendiri menari-nari bersama alunan musik yang menghentak di sepanjang jalan hingga berakhir sore hari di Stadion Utama Kota Jember. Karnaval ini mengambil tema yang berbeda setiap tahunnya. *JFC Council* (JFCC) sebagai panitia, mengaudisi peserta hingga didapatkan ratusan anak muda² yang akan dilatih selama enam bulan untuk bisa merancang kostumnya sendiri, sekaligus memeragakannya di saat karnaval.

Tulisan ini mengkaji JFC pada seputar pertanyaan bagaimana JFC memengaruhi pembentukan identitas kota Jember? Jannah dalam tulisannya berasumsi bahwa identitas pada konteks ini adalah sebuah istilah yang sedikit banyak diketahui artinya seringkali dipahami sebagai produk kultural. Interaksi sebagai *processes of doing identity* pada kenyataannya adalah proses negosiasi antar aktor. Karena identitas dibangun dan diproduksi secara kultural serta dikonstruksi secara

sosial, maka identitas merupakan sesuatu yang cair dan terus-menerus dibentuk dalam interaksi. Kenyataan ini bisa terjadi pada entitas apapun, baik individu maupun kelompok.

Dengan menggunakan diskursus masyarakat yang diajukan oleh Manuel Castells, Jannah ingin menganalisis proses negosiasi proses pembentukan identitas dengan JFC sebagai representasinya. Penggagas JFC yaitu Dynand Fariz menurut tesis Castells sesungguhnya sedang berupaya menegosiasikan identitas baru dan sekaligus mendefinisikan kembali posisi mereka dalam masyarakat. Kemampuan JFC menegosiasikan identitas Kota Jember untuk masuk ke wilayah sosial-kultural Jember, akhirnya akan ada semacam pergeseran konstruksi identitas yang terjadi dari Jember kota tembakau, Jember kota religius, kemudian menjadi Jember kota karnaval fesyen dunia. Meski demikian, dalam praktiknya konstruksi ini tidak terjadi dalam batas-batas yang kaku dan monolitik. Konstruksi identitas Kota Jember yang semula terjadi hanya di dalam wilayah sosio kultural Jember kini melibatkan media di dalamnya, yaitu antara media dan JFC. Hal inilah yang membuat konstruksi identitas Kota Jember sebagai kota karnaval menjadi multi interpretasi.

Munculnya JFC di Jember juga bisa menunjukkan sisi multikultural Jember. Masuknya JFC ke wilayah sosiokultural bisa dimaklumi mengingat hingga kini Jember agak sulit menemukan bentuk budaya aslinya. Jika ditelusuri dari sejarah pembentukan Kota Jember, hal ini memungkinkan karena komposisi masyarakat Jember adalah pendatang yang kemudian bercampur dan membentuk kultur *pendalungan*. *Pendalungan* adalah budaya yang terbentuk dari percampuran budaya Madura dan budaya Jawa. Oleh sebab itulah Jember tidak memiliki budaya yang benar-benar dominan; masyarakat Jember juga mudah menerima inovasi.

Karakter *pendalungan* bisa juga disematkan kepada Situbondo. Walaupun secara statistik penduduk terbanyak berasal dari etnik Madura, namun percampuran (model *pendalungannya*) memiliki ciri khas yang memengaruhi proses berkebudayaan masyarakat Situbondo. Masyarakat muslim di Situbondo dalam membentuk identitas kulturalnya berada pada proses konstruksi yang unik yang menghasilkan ekspresi kebudayaan yang bisa dipandang khas Situbondo..

Perspektif Kajian

Konsep utama yang akan dijadikan pembahasan dalam artikel ini adalah konsep kebudayaan. Sebagai sebuah konsep, kebudayaan merupakan sesuatu yang sangat menarik, selain karena telah banyak pakar yang mengajukan definisinya, juga karena konsep itu sendiri selalu berhadapan dengan perwujudannya. Definisi dari Geertz diantara yang paling mapan, menunjuk kepada “sistem simbol” yang berfungsi sebagai alat pengarah tingkah laku. Di dalam simbol inilah sesungguhnya terdapat tumpukan makna, dengan mana “budaya” sekelompok orang dapat dipahami. Budaya disini lebih menunjuk pada pemahaman sekelompok orang terhadap

hidupnya yang dapat dikatakan sebagai ‘budaya generik’ yang merupakan *blue print* bagi tingkah laku (Abdullah, 2008: vi).

Definisi di atas berbeda dengan definisi kebudayaan yang lebih menekankan pada “budaya diferensial” yang menunjuk pada ciri-ciri yang mewakili suatu kelompok masyarakat. Ciri-ciri tersebut dapat nampak pada sistem ekologis, ekonomi, struktur sosial, dan ideologis yang terkait dengan proses evolusi yang dinamis (Friedman, 1995: 68). Kebudayaan dengan definisi ini lebih merupakan produk (identitas) yang pembentukannya dipengaruhi oleh keseluruhan proses sosial. Karenanya kebudayaan merupakan sesuatu yang dikonstruksikan secara sosial sehingga tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan agen sosial yang terlibat. Sebagai sebuah budaya diferensial, suatu kebudayaan diperoleh melalui serangkaian jaringan yang bersifat dinamis, yang dalam proses negosiasinya terjadi secara intensif dalam proses konstruksinya. Artikel ini mengacu kepada kedua definisi tersebut dengan menekankan pada definisi yang kedua. Selanjutnya yang dimaksud reproduksi budaya pendalungan dalam penelitian ini mengarah pada proses pemaknaan kembali kultur lama yang telah menjadi asal usul primordial individu dalam konteks (ruang) budaya baru yang berubah-ubah.

Budaya pendalungan yang dimaksud adalah konteks ruang (budaya) yang dihuni oleh masyarakat yang memiliki latar belakang etnik yang berbeda. Istilah pendalungan semakna dengan kata campuran atau *Hybrid*. Kategori ini digunakan oleh para ahli budaya untuk menjelaskan kategori-kategori variasi kebudayaan di Jawa Timur. Cakupan variasi kebudayaan Jawa Timur berdasarkan Kabupaten adalah: Kebudayaan Arek meliputi: (Surabaya, Gresik, Tuban, Bojonegoro, Lamongan, Mojokerto dan Malang); Kebudayaan Tengger, meliputi: (Lumajang, Probolinggo, Malang, Pasuruan) Kebudayaan Madura meliputi: (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep); Kebudayaan Mataraman, meliputi: (Madiun, Magetan, Ngawi, Kediri, Blitar) Kebudayaan Pendalungan, yakni sinkretisme Jawa-Madura meliputi: (Jember, Situbondo, Bondowoso) dan Kebudayaan Osing di Banyuwangi (Baca: Saputra, 2001)

Untuk menjelaskan bagaimana proses konstruksi identitas Islam lokal di Situbondo sebagaimana diurai di atas, digunakan kerangka teori konstruksi sosial. Konstruksi sosial melihat suatu realitas merupakan sesuatu yang dibentuk secara sosial. Sehingga Foucault (1990) berpendapat bahwa pengetahuan merupakan produk dari hubungan sosial dan selalu mengalami perubahan. Pengetahuan dengan demikian bukan merupakan realitas yang independent tapi hanya merupakan partisipan dalam konstruksi realitas. Dalam konsep “power/knowledge” menunjukkan bahwa reproduksi pengetahuan telah menjadi kekuatan penting yang menggerakkan seluruh proses pemaknaan kehidupan itu sendiri.

Berger dalam bukunya *The Social Construction of Reality: A Treatise of knowledge* (1966) sebagaimana Foucault, memiliki gagasan pokok yang menjadi

fundamen teorinya adalah dua gagasan sosiologi pengetahuan yaitu “realitas” dan “pengetahuan”. Realitas diartikan sebagai “*a quality pertaining to phenomena that werecognize as having a being independent of our volution*” (Berger, 1966: 13) Ia adalah kualitas yang melekat pada fenomena yang kita anggap berada di luar kehendak kita. Artinya bahwa “realitas” merupakan fakta social yang bersifat eksternal, umum dan mempunyai kekuatan memaksa kesadaran masing-masing individu. Terlepas apakah individu suka atau tidak suka, “realitas” tetap ada.

Sedangkan “pengetahuan” dimaknai sebagai “*the certainly that phenomena are real and that they possess specific characteristic*” (Berger, 1966: 13). Keyakinan bahwa suatu fenomena riil dan mereka mempunyai karakteristik tertentu. Maksudnya pengetahuan merupakan realitas yang hadir dalam kesadaran individu (jadi, realita yang bersifat subjektif). Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan mengkaji kaitan antara kondisi sosial dengan realitas dan pengetahuan sebagaimana yang dibabarkan Berger dan Luckmann dalam bukunya.

Produksi dan reproduksi budaya di wilayah Budaya Pendalungan dalam perspektif ini dipahami sebagai proses aktif yang menegaskan keberadaannya dalam kehidupan sosial sehingga mengharuskan adanya adaptasi bagi kelompok yang memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda. Proses adaptasi ini menyangkut ekspresi kebudayaan dan pemberian makna baru tindakan-tindakan individual melalui reproduksi simbol-simbol.

Untuk memotret proses produksi dan reproduksi budaya dimaksud, peneliti menggunakan kerangka teori konstruksi sosial Peter L. Berger. Dalam konsep konstruksi sosial Berger (1966), masyarakat adalah produk manusia dan manusia adalah produk masyarakat. Dialektika tersebut berlangsung dalam tiga momen simultan yaitu : *Eksternalisasi* --penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural sebagai produk manusia, *objektivasi* -- interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi dan *internalisasi* -- momen individu mengidentifikasi diri di tengah lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial dimana individu tersebut menjadi anggotanya. Dengan demikian budaya Pendalungan sebagai sebuah identitas yang diproduksi manusia mengalami proses, penyesuaian, pelembagaan dan proses internalisasi sebagaimana proses budaya lainnya.

Bulé-Dhika: Reproduksi Budaya yang dibatinkan

Beberapa simbol-simbol budaya baik yang material dan non-material dapat diamati dan diklaim sebagai yang khas di Kabupaten Situbondo. Salah satu yang dapat dipandang penting adalah Bahasa. Bahasa adalah unsur kebudayaan yang penting untuk menjelaskan bagaimana sebuah kebudayaan beroperasi. Dalam kehidupan sehari-hari, secara fungsional keberadaan bahasa menempati posisi yang penting. Penting karena bahasa adalah wahana komunikasi antara manusia. Dengan

bahasa pula sebuah kebudayaan dibangun.

Bahasa sebagai gejala sosial ditentukan dalam pemakaiannya bukan saja ditentukan oleh faktor linguistik, tetapi juga ditentukan oleh faktor-faktor non-linguistik, misalnya faktor sosial dan situasional. Faktor sosial yang mempengaruhi bahasa, misalnya status sosial, tingkat pendidikan, umur, tingkat ekonomi, jenis kelamin dan sebagainya. Faktor situasional yang mempengaruhi bahasa, yaitu siapa berbicara, dengan siapa berbicara dan masalah apa yang dibicarakan. Situasi pemakaian bahasa juga bermacam-macam, seperti suasana percakapan dalam keluarga, antar keluarga, antar tetangga, dalam interaksi jual-beli di pasar, suasana diskusi ilmiah, suasana pidato di alun-alun atau suasana ceramah di sebuah kantor kecamatan. Yang menjadi perhatian dari topik dalam artikel ini bukanlah bahasa sebagaimana dipelajari dalam ilmu bahasa, namun bahasa yang terkait dengan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari.

Bahasa sebagai ekspresi paling manusiawi yang dapat menjadi sesuatu yang baku dan objektif, menjadi cara bagi suatu kelompok sosial untuk berekspresi (*human expressivity is capable of objectivation*). Ekspresi-ekspresi objektif inipun berasal dari sesuatu yang subjektif dari seorang pencetus. Pendek kata untuk mengenal budaya masyarakat Pendalungan Situbondo yang paling mudah adalah dengan mengamati ekspresi dalam berbahasa. Secara faktual, bila diperhatikan secara seksama, masyarakat Situbondo terbiasa menggunakan tiga bahasa sekaligus, yaitu bahasa Indonesia, Madura dan Jawa. Ketiganya dilafalkan dengan intonasi yang khas Situbondo. Karenanya penulis cenderung menyebutnya dengan istilah Situbondoan.

Bahasa Situbondoan merupakan objektivikasi kehidupan sehari-hari dalam berbahasa masyarakat Situbondo. Ia muncul sebagai produk pertemuan antar etnis yang semakin hari batas-batasnya semakin samar. Batas-batas kebudayaan (*physically boundaries*) ini akan semakin menghilang bersamaan dengan proses urbanisasi yang terus berlangsung. Semakin hari penduduk kota akan semakin banyak, bahkan PBB memperkirakan bahwa pada tahun 2025 penduduk Indonesia yang tinggal di kota akan mencapai 60,7 %¹.

Sangat disayangkan dalam proses konstruksinya bahasa Situbondoan nampak kurang disambut secara sukacita oleh masyarakat Pendalungan Situbondo terutama bagi mereka yang beretnik asal bukan Madura. Hal ini kemungkinan besar dipicu oleh *stereotype* terhadap etnik Madura yang memang sudah sejak lama ada, bahkan sejak jaman kolonial². *Stereotype* Madura, walaupun cenderung dinegasikan oleh masyarakat Situbondo, namun dalam praktiknya nampak adanya keengganan

¹ United Nations , *World Urban Prospects* (New York: United Nations, 1995).

² Huub de Jonge. "Stereotypes of the Madurese" dalam K. Van Dijk., et.al, (ed.). *Across Madura Strai: The Dynamics of an Insular Society* (Leiden: Koninklijk Instituut voor Taal -Land en Volkenkunde KITLV- Press, 1995), 23

menggunakan bahasa Situbondoan, kecuali dalam sebuah *moment* yang lebih didominasi oleh yang beretnik Madura.

Penulis memandang ini sebagai sebuah fenomena kontestasi antara bahasa daerah yang ada di Situbondo. Dalam praktiknya orang Situbondo dapat dikatakan umumnya biasa menggunakan tiga bahasa, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Jawa dan Bahasa Madura. Dalam kontestasi inilah muncul bahasa Situbondoan sebagai hasilnya. Warga di luar etnik Madura merasa nyaman menggunakan bahasa Situbondoan ini karena merasa ikut memiliki walaupun mereka tahu bahwa itu sebuah logat atau dialek saja dari Bahasa Madura. Nampaknya ada semacam sebuah kesadaran baru bahwa saya adalah orang Situbondo. Appandurai³ menyebutkan bahwa dalam proses pembentukan identitas, mencairnya batas-batas kebudayaan telah memberikan kerangka kultural bahasa yang karenanya turut pula memberikan kesadaran baru untuk mendefinisikan kembali kebudayaan dan identitas yang dianut.

Warga Situbondo menggunakan bahasa dan Bahasa Situbondoan secara variatif. Di lingkungan keluarga, di kantr dan pada even-even warga yang lain, dalam pengamatan peneliti menggunakan bahasa secara berganti-ganti. Bagi keluarga Jawa, dalam hal ini ayah dan ibu beretnik Jawa, maka dalam keluarga tersebut cenderung menggunakan bahasa Jawa dan Bahasa Indonesia. Kita ambil contoh keluarga Pak Andi, suami-istri yang berasal dari Solo, sehari-hari di rumah menggunakan Bahasa Jawa, namun menggunakan Bahasa Indonesia dengan anak semata wayangnya. Di sini nampak bahasa pergaulan anak sehari-hari dengan teman-temannya yang multi-etnik cukup mempengaruhi pilihan bahasa yang digunakan. Hal ini berbeda dengan keluarga Pak Heru, suami istri berasal dari Kediri. Sehari-hari di rumah menggunakan Bahasa Jawa bahkan dengan anak-anaknya. Di luar rumah dia menggunakan bahasa sesuai dengan lawan bicara. Bila dengan sesama orang Jawa, maka menggunakan bahasa Jawa. Bila lawan bicara dari etnik non-Jawa, maka menggunakan Bahasa Indonesia.

Dari dua kasus keluarga Jawa di atas nampak adanya perbedaan komitmen dalam penggunaan bahasa. Keluarga pertama nampak realistis saja dalam penggunaan bahasa di Keluarga, berbeda dengan keluarga kedua yang lebih nampak berkomitmen untuk menghadirkan suasana Jawa di dalam keluarga.

Dari pengamatan praktik berbahasa yang dituturkan masyarakat Pendalungan Situbondo nampak ada suatu proses pencarian diri kultural. Pencarian diri kultural melalui bahasa ini bukanlah suatu hal yang sederhana karena selain menyangkut pendefinisian diri dan yang “liyan” juga konstruksi dominan yang dimainkan oleh Pemerintah Daerah atas nama masyarakat Situbondo. Nampaknya masa depan ba-

³ Arjun Appandurai, “Global Ethnoscapes: Notes and Queries for Transnational Anthropology”, dalam R.G.Fox (ed.), *Recapturing Anthropology: Working in the Present* (Santa Fe, NM: School of American Research Press, 1994), 193

hasa Situbondoan akan sangat ditentukan oleh praktik penggunaannya dalam kehidupan actual masyarakat Situbondo sehari-hari. Dari uraian di atas dapat ditangkap bahwa masyarakat Situbondo membutuhkan sebuah bahasa dalam rangka pengidentifikasian diri sebagai orang Situbondop. Bagi penulis, *Bulé-Dhika*, adalah istilah yang cukup tepat disematkan terhadap bahasa Situbondoan berdasarkan popularitasnya dalam praktik berbahasa sehari-hari.

Kota Santri dan Bumi Salawat Nariyah.

Nampaknya istilah Kota Santri dan Bumi Salawat Nariyah yang memenuhi ruang publik dan percakapan baik informal dan yang informal adalah sesuatu yang sedang dibatinkan dan dijadikan acuan dalam berperilaku masyarakat Pendalungan Situbondo. Dengan menjelaskan fenomena tersebut kiranya dapat memberikan suatu pemahaman tentang hubungan agama dan budaya di Kabupaten Situbondo.

Seturut dengan apa yang dilukiskan Geertz⁴, pemahaman keagamaan sangat dipengaruhi oleh bagaimana memandang apa itu agama dalam manifestasi empirisnya. Geertz melihat agama sebagai suatu sistem kebudayaan. Kebudayaan tidak didefinisikan sebagai pola kelakuan, tetapi pola bagi (*model for*) kelakuan, yaitu yang terdiri atas serangkaian aturan-aturan, resep-resep, rencana-rencana, dan petunjuk-petunjuk yang digunakan manusia untuk mengatur tingkah lakunya.

Geertz memberikan pengertian kebudayaan sebagai memiliki dua elemen, yaitu kebudayaan sebagai sistem kognitif serta sistem makna dan kebudayaan sebagai sistem nilai. Sistem kognitif serta sistem makna merupakan representasi pola dari atau model of, sedangkan sistem nilai adalah representasi kenyataan -- sebagaimana wujud nyata kelakuan manusia sehari-hari, maka "pola bagi" ialah representasi dari apa yang menjadi pedoman bagi manusia untuk melakukan tindakan itu. Contohnya adalah upacara keagamaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat merupakan "pola dari", sedangkan ajaran yang diyakini kebenarannya sebagai dasar atau acuan melakukan upacara adalah "pola bagi" atau *model for*.

Timbul pertanyaan bagaimana menghubungkan pola dari dan pola bagi dari sistem kognitif dengan sistem nilai, yaitu kaitan antara bagaimana menerjemahkan sistem pengetahuan dan makna menjadi sistem nilai atau menerjemahkan sistem nilai menjadi sistem pengetahuan dan makna. Bagi Geertz, kebudayaan pada intinya terdiri dari tiga hal utama, yaitu sistem pengetahuan atau kognitif, sistem nilai atau sistem evaluative dan simbol yang memungkinkan pemaknaan atau interpretasi. Titik pertemuan antara pengetahuan dan nilai yang dimungkinkan oleh simbol dinamakan makna (*system of meaning*). Dengan demikian, melalui sistem makna sebagai perantara, sebuah simbol dapat menerjemahkan pengetahuan menjadi nilai dan menerjemahkan nilai menjadi pengetahuan.

⁴ Baca : Clifford Geertz, Abangan, *Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. ter. Aswab Mahasin (Jakarta: Pustaka Jaya, 1983).

Dengan perspektif Geertz di atas, posisi budaya *pendalungan* yang menjadi karakteristik masyarakat Kabupaten Situbondo sebagai “*pola dari*” sedangkan ajaran yang diyakini kebenarannya sebagai dasar atau acuan melakukan kegiatan keagamaan adalah “*pola bagi*”. Karakteristik *pendalungan* yang terbuka, ekspresif, memiliki ikatan kekerabatan yang kuat, serta memiliki solidaritas mekanik yang merupakan “*pola dari*” perilaku harmoni. Sedangkan keyakinan-keyakinan yang berasal dari ajaran-ajaran agamanya merupakan “*pola bagi*” perilaku harmoni. Dengan demikian harmoni diantara warga dari berbagai etnik dapat dimengerti merupakan hasil konstruksi warga di dalam kehidupan sehari-hari yang menggambarkan hubungan gama dan budaya sebagai wujud nyata kelakuan manusia sehari-hari dan representasi dari apa yang menjadi pedoman bagi manusia untuk melakukan tindakan itu.

Hubungan-hubungan sosial budaya pada masyarakat Kabupaten Situbond yang diwujudkan dalam berbagai ekspresi kebudayaan simbolik yang pada gilirannya akan menentukan dinamika sekaligus integrasi yang bersifat komplementer yakni saling bergantung dan bisa juga sebaliknya. Hal ini pulalah yang ditemukan oleh Geertz dalam penelitian sosialnya terhadap masyarakat Modjokuto⁵. Dengan paradigma fungsional-interpretif, Geertz melihat beberapa perbedaan antara struktur dan kultur (pedesaan, pasar dan jajaran birokrasi) dalam simbol asosiatif, yakni abangan, santri dan priyayi, dimana perwujudan struktur sosial masing-masing menimbulkan dinamika kehidupan tersendiri.

Tipologi sosial model Geertz di atas tentu tidak bisa dicangkokkan sepenuhnya untuk masyarakat Pendalungan Situbondo. Apa yang digambarkan Geertz di atas tentu tidak bisa dicangkokkan sepenuhnya untuk konteks masyarakat pendalungan Situbondo. Budaya Pendalungan adalah budaya *hybrid* hasil akulturasi beberapa budaya dalam hal ini terutama Budaya Jawa dan Madura. Karenanya orang Jawa dan orang Madura di wilayah ini tentu berbeda dengan Jawa dan Madura di tempat asalnya masing-masing. Misalnya apa yang digambarkan oleh Kuntowijoyo⁶ bahwa orang Madura cenderung individual karena kondisi geografis yang kering di daerahnya, sedang orang Jawa dikatakan lebih bersifat komunal dan akrab dengan alam karena orang Jawa berasal dari tanah yang subur (wilayah pertanian sawah). Apa yang dapat diamati di Situbondo, orang-orang Jawa dan Madura sudah menjadi orang yang berbeda dengan karakteristik yang menggambarkan akulturasi, seling menyerap satu sama lain yang dalam artikel ini disebut sebagai Budaya Pendalungan (*Hybrid*). Masing-masing etnik yang mendiami wilayah ini nampak tidak berusaha untuk saling mempertahankan identitas partikular tradisionalnya.

Satu istilah yang dapat dipandang sebagai petanda kehidupan masyarakat Sit-

⁵ Baca: Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*.

⁶ Baca : Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940* (Jogjakarta: Mata Bangsa, 2002).

ubondo adalah kata SANTRI yang telah dijadikan istilah resmi : Situbondo Kota SANTRI. Istilah santri disini pada awalnya merupakan akronim untuk kepentingan lomba kebersihan kota dalam rangka memperebutkan Piala Adipura. Dalam perkembangannya ia telah menjadi kenyataan objektif dalam ruang kesadaran masyarakat Situbondo yang memiliki makna lain. Isfironi⁷, dalam penelitiannya tentang harmoni kehidupan beragama masyarakat Situbondo memperoleh suatu pemahaman yang berbeda tentang istilah santri. Bila selama ini yang dimaksud dengan santri yaitu murid di pondok pesantren, atau sebagai kategori sosial sebagaimana yang dipopulerkan Geertz, di Situbondo santri bisa dipahami sebagai pengikut setia atau loyalis kyai.

Alasan lain populernya istilah santri di Situbondo karena secara empirik terdapat banyak Pondok Pesantren. Kondisi ini secara kualitatif ikut memberikan suasana Pondok Pesantren, sehingga istilah kota santri menjadi sesuatu yang wajar dan mudah diterima masyarakat Situbondo. Dalam kehidupan sehari-hari dapat dijumpai sebuah ungkapan : *“tak adduh, mon orèng Situbénddéh tengkanna tak mara santrè”* (tidak cocok, apabila orang Situbondo perilakunya tidak seperti santri)⁸.

Fakta-fakta tersebut nampaknya cukup menguatkan argumentasi mengapa kemudian istilah Kota Santri menjadi penting sebagai penanda sekaligus petanda kehidupan masyarakat Situbondo. Kehidupan pondok pesantren yang berpusat pada pribadi para Kyai tidak hanya memberikan pengaruh di dalam lingkup internal, namun di luar pagar Pondok Pesantren pengaruhnya jelas dapat dirasakan dalam denyut nadi kehidupan masyarakat Situbondo sehari-hari.

Relasi Kyai dan Masyarakat

Secara sosial-antropologis kekuatan masyarakat Situbondo adalah pada kekerabatannya. Mereka adalah masyarakat yang cenderung berwatak komunal, terbuka dan suka bekerja keras. Etika sosial seperti tata karma, sopan santun atau budi pekerti masyarakat Situbondo berakar dari nilai-nilai yang diusung dari dua kebudayaan utama di Situbondo yaitu Jawa dan Madura. Salah satu yang menonjol dari etika sosial masyarakat Situbondo adalah penghormatannya kepada para Kyai. Hubungan Kyai-Masyarakat di Situbondo dapat dikategorikan dalam model patron-klien. Hubungan ini diperkuat pula oleh keyakinan-keyakinan keagamaan yang menjadi ciri masyarakat Pendalungan Situbondo.

Hubungan patronase Kyai-Masyarakat nampak pula menjadi nuansa dalam proses pemunculan simbol-simbol budaya dan juga politik. Hubungan patronase ini

⁷ Baca: Mohammad Isfironi, Harmoni dalam Perbedaan: Studi Konstruksi Sosial Kerukunan antar warga NU, Muhammadiyah dan LDII di Desa Awar-awar Asembagus Situbondo dalam Nuhriison (ed.), *Dimensi-dimensi Kehidupan Beragama: Studi tentang Paham/Aliran Keagamaan, Dakwah dan Kerukunan* (Jakarta: Puslitbang Depag, 2011).

⁸ Ungkapan ini walaupun belum sangat populer, namun nampak diterima secara sukarela oleh masyarakat Situbondo sebagai nilai-nilai kebaikan yang dijadikan pedoman berperilaku.

bisa jadi berawal dari keyakinan kultural masyarakat Situbondo dari nilai-nilai Budaya Madura yang sangat menghormati bapak/ibunya, gurunya dan pemimpinnya. Umumnya nilai ungkapan “*Bepak, Bebuk, Guru, Rato*” (Bapak, Ibu, Guru, Pemimpin/Raja) di kalangan masyarakat Pendalungan Situbondo masih dipandang relevan. Kalaupun sering dicurigai sebagai memiliki tujuan ideologis tertentu, namun hal tersebut tetap diyakini sebagai nilai-nilai kebaikan yang layak dipedomani.

Kesan yang dapat penulis tangkap tentang hubungan Masyarakat Situbondo memiliki kecenderungan untuk bersikap sangat santun dan patuh *sami'na wa ato'na* (kami mendengar dan mematuhi) terhadap ucapan dan isyarat Kyai, bahkan memiliki kecenderungan untuk selalu melibatkan (tergantung) kepada Kyai dalam persoalan keseharian. Hal ini menggambarkan adanya sebuah kepercayaan yang begitu tinggi kepada seorang Kyai, dengan meyakini bahwa Kyai merupakan tempat untuk menuntaskan semua persoalan yang sedang dihadapi oleh seorang warga.

Relasi antara Kyai dan umatnya, sebagaimana dapat disaksikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Situbondo tersebut, menjadi sebuah realitas yang layak untuk ditelaah lebih lanjut khususnya mengani pasang-surut dan faktor-faktor yang merubah konfigurasi relasi patron-klien tersebut. Dalam pandangan sepintas, relasi yang bernuansa ‘fanatis-doktriner’ tersebut memiliki peluang yang sangat kecil untuk berubah. Namun dengan memperhatikan relasi simbolik diantara warga Situbondo, relasi kyai-masyarakat dapat dikatakan terlalu ceroboh bila tidak dimasukkan ke dalam kategori hal-hal yang mempengaruhi konstruksi identitas Islam lokal masyarakat pendalungan Situbondo.

Secara umum, walaupun telah cukup banyak perubahan sosial budaya yang meningkat sejak reformasi 1998, justru pola relasi antara kyai dan masyarakat tersebut dapat dikatakan stagnan..Namun bila yang dimaksud adalah loyalitas dan keberpihakan, maka ada sedikit pergeseran perilaku. Pergeseran yang dimaksud adalah bahwa pada masa yang lalu (sebelum reformasi), masyarakat tidak pernah membedakan antara Kyai yang satu dengan Kyai yang lain, dalam artian, tidak pilih-pilih Kyai untuk menampakkan sikap loyalnya. Karenanya, pada saat itu sangat jarang sekali terdengar adanya satu komunitas masyarakat yang terkotak-kotak dalam barisan Kyai tertentu, melainkan Kyai diperlakukan dan dihormati secara bersama-sama. Kalau toh ada perbedaan yang terjadi diantara Kyai, biasanya masyarakat memilih untuk tidak terlibat, dan menyatakan tetap taat kepada kedua Kyai tersebut, dan mereka menganggap bahwa tidak pada tempatnya mereka terlibat dalam perbedaan tersebut.

Kecenderungan tersebut, saat ini nampaknya telah ikut berubah dengan berubahnya situasi sosial budaya dan politik. Setelah era reformasi, sedikit demi sedikit masyarakat juga mulai terkotak-kotak untuk berkubu dengan salah seorang Kyai, dan menentang Kyai yang diidentifikasi berseberangan pendapat tentang berbagai persoalan dengan Kyai yang menjadi patron mereka. Selebihnya Kyai dapat

dikatakan sebagai agen perubahan sosial budaya yang riil di Situbondo. Oleh karenanya reproduksi kebudayaan Pandalungan di Situbond tidak terlepas dari wibawa pada Kyai.

Kesimpulan

Bagi Berger dan Luckman, masyarakat adalah suatu kenyataan objektif sekaligus subjektif. “*Society is a human product, society is an objective reality*”⁹. Sebagai kenyataan objektif, masyarakat berada di luar diri manusia dan berhadapan-dengannya. Sebagai kenyataan subjektif, individu berada di dalam masyarakat itu sebagai bagian tak terpisahkan. Individu adalah pembentuk masyarakat dan masyarakat adalah pembentuk individu. Dengan sentuhan Hegel, yaitu tesis, antithesis dan sintesis, Berger menemukan konsep yang menghubungkan subjektifitas individu dan objektifitas masyarakat melalui konsep dialektika yang dikenal dengan eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi.

Berdasarkan nalar konstruksi di atas, jelaslah kiranya bahwa suatu analisa mengenai dunia sosial yang mengesampingkan salah satu dari tiga momen di atas akan menghasilkan suatu yang distorsif. Hanya dengan pengalihan dunia sosial kepada generasi baru (artinya internalisasi sebagaimana yang dilaksanakan dalam sosialisasi) maka dialektika sosial yang mendasar itu tampil dalam totalitasnya. Tegasnya hanya dengan munculnya generasi baru kita benar-benar bisa berbicara tentang suatu dunia sosial¹⁰.

Dengan kerangka pikir di ataslah penulis menjawab pertanyaan problematik yang diajukan dalam artikel ini. Bahwa setiap aktor yang terlibat dalam proses konstruksi identitas Islam Lokal memiliki pandangan yang sangat dipengaruhi kondisi objektif dan subjektif aktor dalam memandang berbagai produk budaya yang diproduksi masyarakat pendalungan Situbondo. Bagi masyarakat umum kehidupan sosial cenderung mereka lalui dengan sebuah kesadaran praktis. Artinya segala produk budaya yang material dan yang non-material seperti nilai-nilai, motivasi-motivasi mereka serap secara *taken for granted*.

Berbeda dengan masyarakat biasa, tokoh masyarakat terutama tokoh/pejabat pemerintahan daerah lebih menangkap proses reproduksi budaya pendalungan dengan kesadaran diskursif sehingga dapat secara aktif mengkonstruksikan sedemikian rupa menjadi identitas kabupaten. Istilah Kota Santri dan Salawat Nariyah sebagai sebuah simbol diposisikan dengan sebuah landasan nilai atas semua kebijakan yang dicanangkan. Sosialisasi pembacaan shalawat nariyah di lingkungan birokrasi merupakan bukti penggunaan shalawat nariyah sebagai alat legitimasi atas sebuah

⁹ Peter L Berger and T. Luckman, *The Social Construction of Reality*. (Garden City: Doubleday, 1966).

¹⁰ Peter L Berger and T. Luckman, *The Social Construction of Reality*. (Garden City: Doubleday, 1966), 79

kebijakan, walaupun secara akademik juga bisa diterima sebagai sebuah spirit dalam pembangunan. Para tokoh-tokoh agama yang sudah sejak awal berda pada budaya/tradisi santri tentu memiliki alasan yang lebih otoritatif, sehingga legitimasinya dapat disandingkan dengan legitimasi kekuasaan birokrasi yang menjadi domain pemerintah daerah.

Dengan demikian menjadi Kota Santri dan Bumi Shalawat Nariyah disamping bahasa *Bulé-dhika* justru juga menunjukkan sebuah kenyataan objektif dari ciri khas masyarakat Pandalungan yang multi-etnik yang selalu berada dalam proses negosiasi yang pada gilirannya mampu mereproduksi apa yang disebut budaya Pandalungan. Namun di sisi lain justru kondisi liminal inilah yang kemudian memberikan peluang simbol-simbol Islam diakomodir menjadi penanda identitas bagi sebuah masyarakat pendalungan di Situbondo.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan. 2007. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- . 2008. *Kata Pengantar* dalam Hans J. Daeng, Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan: Tinjauan Antropologis. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Barth, Fredrik. 1988. *Kelompok Etnik dan Batasannya*. Jakarta. UI Press.
- Berger, Peter, L and Luckman, T, 1966. *The Social Construction of Reality*. Garden City: Doubleday.
- Berger, Peter, L. 1967. *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theori of Religion*. New York. Anchor.
- Berger, Peter, L. 1992. *Kabar Angin dari Langit*. ter. J.B. Sudarmanto. Jakarta. LP3ES
- Friedman, Jonathan. 1995. *Cultural Identity & Global Process*. London. SAGE Publications
- Friedman, L, Thomas. 2009. *The World is Flat: Sejarah Ringkas Abadke-21*. ter. P. Buntaran dkk. Jakarta. Dian Rakyat.
- Featherstone. 1991. *Consumer Culture and Postmodernism*. London. SAGE Publications.
- Al-Jabiri, 'Abid, Muhammad.1993. *Bunyah al-'Aql al 'Arabiy*. Beirut. al-Markaz al-Tsaqafi al-'Arabiy.
- Jannah, Raudlatul. 2012. Jember Fashion Carnival: Konstruksi Identitas dalam Masyarakat Jaringan. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*. Vol. 17 No. 2 Bulan Juli.
- Idris, Mardjoko. 2012. *Implementasi Paradigma Integrasi-Interkoneksi Dalam*

- Penelitian 3 (tiga) disertasi Dosen UIN Sunan Kalijaga*. Yogyakarta. Lemlit. UIN Sunan Kalijaga
- Kleden, Ignas. 1987. *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*. Jakarta. LP3ES
- Kutowijoyo. 2006. *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta. Tiara Wacana
- Minhaji, Akh. 2009. *Strategies for Social Research: The Methodological Imagination in Islamic Studies*. Yogyakarta. SUKA-Press.
- Muhadjir, Noeng. 1998. *Filsafat Ilmu*. Yogyakarta. Rake Sarasin
- Nuh, M, Nuhriison. 2011. *Dimensi-dimensi Kehidupan Beragama*. Jakarta. Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama R.I.
- Parimartha, I Gde dkk. 2012. *Bulan Sabit di Pulan Dewata: Jejak Kampung Islam Kusamba-Bali*. Yogyakarta. CRCS
- Probowati, Nurul, Putri. 2011. *Reproduksi Masyarakat dan Implikasi Spasial dalam Proses Transformasi Kampung Laweyan*. Jakarta. Tesis Departemen Arsitektur Fakultas Teknik UI Depok
- Saputra, S, P, Heru. 2001. *Tradisi Mantra Kelompok Etnik Using di Banyuwangi dalam Jurnal Humaniora Universitas Negeri Jember*. Vol. XIII, No. 3/2001.
- Daniel sparringa, dalam *Membaca Peta Politik Jawa Timur, Perspektif Sosiologi Politik*, makalah disampaikan dalam seminar tentang Peta Politik dan lokalitas Masyarakat Jawa Timur, 2006.
- Syam, Nur. 2007. *Madzhab-madzhab Antropologi*. Yogyakarta. LKIS